

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah berpedoman pada arah kebijakan ekonomi nasional. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023 (RPJMN 2020-2024), arah kebijakan ekonomi nasional adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini diambil sebagai upaya untuk melanjutkan estafet pembangunan nasional dengan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2021 dan kebijakan tahun 2022, dengan mempertimbangkan juga isu strategis dan dinamikan pandemi Covid-19. Mempertimbangkan hal tersebut, prioritas pembangunan nasional pada tahun 2023 mencakup 7 hal yaitu 1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), 3) penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*, 4) mendorong pemulihan dunia usaha, 5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas, 6) ekonomi hijau, dan 7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

Dengan didukung kondisi fiskal dan pelaksanaan *major project* di semua wilayah pada tahun 2022, maka indikator makro tahun 2023 secara nasional adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,3-5,9 persen; tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,3-6,0 persen; tingkat kemiskinan menurun menjadi sebesar 7,5-8,5 persen; nilai Rasio Gini yang membaik menjadi 0,375-0,378; dan pembangunan Emisi Gas Rumah Kaca menurun menjadi 27,02 persen. Dari sisi pembangunan manusia dan kesejahteraan, pada tahun 2022 diharapkan Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 73,31-73,49; Nilai Tukar Petani meningkat menjadi 103-105, serta Nilai Tukar Nelayan meningkat menjadi 106 – 107.

Terdapat 7 Prioritas Nasional dalam RKP 2022 kali ini. Prioritas ini sejalan dengan fokus pembangunan bagi industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi pendidikan dan keterampilan. Pencapaian prioritas pembangunan tersebut didukung oleh pelaksanaan beberapa *major project*. Dalam upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2023, maka investasi akan menjadi salah satu kunci, karena investasi mampu menciptakan lapangan kerja lebih besar dan mengembalikan kembali kondisi sebelum pandemi di mana terdapat lapangan pekerjaan yang layak. Selain itu, beberapa faktor yang dapat mendorong pemulihan ekonomi adalah ekspor yang kembali membaik dan sektor industri pengolahan yang kembali beroperasi seiring meningkatnya aktivitas dan mobilitas di 2023.

Dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2023 kondisi perekonomian Jawa Tengah diperkirakan meningkat setelah pandemi berakhir melalui upaya pelaksanaan vaksinasi pada masyarakat, sehingga faktor – faktor ekonomi dapat bergerak secara normal. Capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2023 diproyeksikan pada kisaran 5,00 - 5,60 persen. Sedangkan proyeksi pengendalian inflasi berada pada kisaran 3,0±1 persen, yang dapat dicapai melalui perkuatan distribusi, ketersediaan

dan kecukupan bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal diproyeksikan juga mengalami peningkatan menjadi **4,20 – 5,35 %** dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sampai diangka **-1,46%**. Meskipun mengalami pertumbuhan negative, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal di tahun 2020 jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, dan provinsi masih relatif lebih baik. Terkait hal tersebut maka arah kebijakan pembangunan ekonomi kabupaten Tegal tahun 2023 guna mendukung target pertumbuhan sebesar **4,20 – 5,35 %** untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan pasca pandemi covid-19 diarahkan pada **Pengembangan Infrastruktur, Ekonomi, Budaya dan Lingkungan Hidup Yang Nyaman**. Upaya pemenuhan target tersebut diarahkan pada aspek penumbuhan dan akselerasi perekonomian wilayah. Berbagai infrastruktur penunjang ekonomi baik skala kecil maupun besar perlu dipenuhi kebutuhannya berdasarkan skala prioritas. Pada tahap ini juga pengembangan seni-budaya dikolaborasikan dengan pengembangan sektor pariwisata. Pembangunan dan pengembangan objek/destinasi wisata mulai digerakkan, khususnya pada aspek pembangunan dan penataan fasilitas dan jasa pariwisata. Untuk mendukung kualitas lingkungan hidup, maka eco-tourism menjadi tema pembangunan pariwisata.

3.1.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Tegal

Covid-19 yang mulai merebak di Indonesia pada awal tahun 2020 memberikan dampak yang masif terhadap kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Selain itu, virus ini juga memberikan tekanan yang besar pada ketahanan perekonomian. Selama pandemi berlangsung, rumah tangga dan perusahaan cenderung mengadopsi perilaku konsumsi yang berhati-hati (Olivia dkk., 2020). Hal ini menyebabkan pergerakan perekonomian menjadi lebih lamban, dan bahkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi pada tahun 2020.

Keputusan pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran Covid-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021). Seiring berjalannya waktu dan perubahan kebijakan, perlahan perekonomian Indonesia mulai pulih meskipun masih rentan terdampak pandemi (World Bank, 2021). Pemulihan ini terjadi hingga level kabupaten/kota, salah satunya wilayah Kabupaten Tegal.

Kondisi perekonomian Kabupaten Tegal hingga tahun 2019 menunjukkan tanda pemulihan selama satu dekade setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang tetap menunjukkan arah positif hingga tahun 2019. Sayangnya, pandemi covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan perekonomian Kabupaten Tegal mengalami kontraksi yang ditandai dengan arah pertumbuhan yang negatif. Namun, kondisi ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal Kembali mengalami pemulihan dan ditandai dengan arah pertumbuhan positif.

Proyeksi perekonomian daerah Kabupaten Tegal tahun 2023 selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 3.1. Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Tegal

NO	Indikator	Target	
		2022	2023
1.	PDRB/PDB :		
	a. Atas dasar harga berlaku (miliar rupiah)	37.725,82	39.310,10
	b. Atas dasar harga konstan (miliar rupiah)	26.171,73	27.270,94
2.	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	3,59 – 5,20%	4,2 – 5,35%
3.	Inflasi (persen)	2-4%	2-4%
4.	PDRB/Kapita atas dasar harga berlaku	23,43	23,52
5.	a. Nilai Investasi PMA	540 Miliar	560 Miliar
	b. Nilai Investasi PMDN	900 Miliar	925 Miliar
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	10,21 - 9,42	10,12 - 9,14
7.	Kemiskinan (persen)	8,45 - 8,12	8,35 - 8,05

Sumber: Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2014, 2022

Proyeksi pertumbuhan komponen pengeluaran PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2021 - 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.2. Proyeksi Pertumbuhan Komponen Pengeluaran PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2022 – 2023

Komponen Pengeluaran	Proyeksi Pertumbuhan (persen)	
	2022	2023
1. Konsumsi RumahTangga	2,25 - 3,65	3,65 – 5,83
2. Konsumsi LNPRT	3,35 - 4,32	4,43 – 6,32
3. Konsumsi Pemerintah	2,54 – 3,82	3,34 – 4,21
4. PMTB	1,32 – 4,45	4,32 – 5,23
5. Perubahan Inventori	-	-
6. Ekspor	4,24 – 5,52	4,56 – 5,42
7. Import	4.25 – 5,53	4,34 – 5,28

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2022 *) Proyeksi

Perubahan kontribusi sektoral pada struktur PDRB menunjukkan proses perkembangan daerah. Perekonomian daerah yang semakin maju biasanya ditandai dengan kontribusi sektor primer yang cenderung mengalami penurunan, sedangkan kontribusi sektor sekunder dan sektor tersier menunjukkan peningkatan. Struktur ekonomi biasanya dilihat dengan pendekatan makro sektoral, yaitu berdasarkan kontribusi lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB. Proyeksi pertumbuhan yang diharapkan dapat tercapai di tahun 2023 berdasarkan jenis lapangan usaha adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.3 Proyeksi Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB
Kabupaten Tegal Tahun 2022 dan 2023**

Lapangan Usaha/Industri		Proyeksi Pertumbuhan (%)	
		2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,75 – 3,42	2,78 – 3,46
B	Pertambangan dan Penggalian	2,45 – 2,54	3,05 – 4,23
C	Industri Pengolahan	1,56 – 2,65	2,72 – 3,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,24 – 5,42	2,35 – 5,53
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,40 – 4,45	3,50 – 4,65
F	Konstruksi	1,80 – 4,82	2,53 – 5,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,75 – 5,83	2,95 – 5,95
H	Transportasi dan Pergudangan	1,45 – 2,45	2,67 – 6,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,50 – 6,85	5,32 – 7,53
J	Informasi dan Komunikasi	5,8 – 6,25	5,32 – 6,75
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,43 – 3,54	2,56 – 3,68
L	Real Estate	1,45 – 2,56	2,25 – 3,90
M,N	Jasa Perusahaan	2,43 – 3,87	2,87 – 4,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,46 – 4,20	2,67 – 5,63
P	Jasa Pendidikan	1,56 – 3,45	2,65 – 5,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,67 – 6,76	2,12 – 6,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,82 – 4,53	3,21 – 5,32

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2022 *) Proyeksi

Selanjutnya, PDRB berdasarkan pengeluaran menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Tegal digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori).

**Tabel 3.4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Konsumsi Rumah Tangga	25.528,07	27.273,26	29.326,84	29.193,99	30.392,75
2. Konsumsi LNPRT	425,74	464,88	527,47	517,54	544,26
3. Konsumsi Pemerintah	2.202,61	2.317,40	2.459,35	2.310,83	2.392,38
4. PMTB	7.619,09	8.286,81	9.014,59	8.292,48	9.037,15
5. Perubahan Inventori	237,38	340,80	286,38	280,05	276,43
6. Ekspor	17.714,15	18.754,81	20.368,78	19.040,69	21.550,39
7. Impor	23.448,52	24.667,61	26.765,44	24.335,55	26.857,36
Total PDRB	30.278,51	32.770,35	35.217,97	35.300,03	37.335,99

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2022 *) Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara

**Tabel 3.5 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Konsumsi Rumah Tangga	18.490,19	19.416,16	20.236,89	19.966,91	20.400,35
2. Konsumsi LNPR	281,76	300,17	332,90	322,98	328,77
3. Konsumsi Pemerintah	1.397,85	1.451,26	1.508,98	1.424,10	1.437,11
4. PMTB	5.054,92	5.315,05	5.573,08	5.105,48	5.391,29
5. Perubahan Inventori	121,26	125,19	123,45	205,96	156,76
6. Ekspor	11.691,45	12.203,51	12.906,03	12.366,46	14.417,63
7. Impor	14.715,33	15.258,79	15.819,84	14.899,22	16.729,00
Total PDRB	22.322,10	23.552,55	24.861,50	24.492,67	25.402,91

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2022 *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sebagian besar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal disumbangkan oleh sektor konsumsi (lebih dari 80%). Kondisi ini relatif kurang memberikan kesinambungan bagi perekonomian internal Kabupaten Tegal, karena konsumsi merupakan hasil akhir dari proses produksi dan belum tentu barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat Kabupaten Tegal berasal dari produksi internal Kabupaten Tegal. Selain itu, konsumsi relatif rentan terhadap perubahan harga (yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari sisi produksi, distribusi, hingga permintaan konsumen). Idealnya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu ditopang oleh investasi yang meningkat, sehingga ketersediaan (hasil produksi) barang dan jasa semakin banyak. Hanya saja, dalam masa pandemi, investasi menjadi hal yang sangat terdampak.. Pada saat ini terjadi, maka menjadi tugas pemerintah untuk melakukan intervensi melalui pengeluaran pemerintah dalam rangka menopang perekonomian. Karena sumberdaya pemerintah terbatas, maka intervensi yang dilakukan diprioritaskan pada sektor yang memiliki daya ungkit besar dan menyerap banyak tenaga kerja.

Guna mencapai proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas, perlu dilakukan identifikasi tantangan, peluang dan arah kebijakan untuk mewujudkan proyeksi dimaksud. Tantangan ekonomi Kabupaten Tegal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Penanganan pandemi covid-19 belum usai, hampir seluruh daerah bahkan negara harus menghadapi tantangan yang sama, di waktu yang bersamaan. Situasi seperti ini sangat jarang terjadi, peperangan melawan pandemi virus belum akan tuntas dalam waktu cepat. Meskipun bisa secepatnya tertangani lantaran keberadaan vaksin semakin nyata, setiap daerah masih harus menghadapi tantangan pemulihan ekonomi yang berkontraksi sebagai konsekuensi penanganan pandemi. Setelah berbulan-bulan diberlakukan pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi, banyak daerah yang sudah mulai melakukan upaya menyeimbangkan kebijakan antara dua persoalan yang sesungguhnya bukan pilihan. Banyak daerah kini mulai berupaya menghindari keruntuhan total perekonomian sekaligus mencegah meluasnya atau munculnya gelombang baru pandemi, ditambah dengan adanya implementasi vaksinasi. Keseimbangan pilihan tersebut jelas bukan perkara mudah. Tetapi setidaknya ada celah-celah pemulihan ekonomi ditengarai mulai terlihat. Hanya saja, pemulihan perekonomian diperkirakan berjalan lambat lantaran masa depan penanganan pandemi belum benar-benar jelas. Ditambah lagi dengan munculnya varian baru virus. Perekonomian kawasan, regional dan nasional diperkirakan baru akan kembali ke level sebelum pandemi pada 2022 atau 2023, dengan catatan efektivitas vaksin benar-benar terjadi yang mempengaruhi percepatan pemulihan.

2. Persaingan Pasar Global

Rezim pasar bebas hari ini dari yang bersifat internasional seperti AFTA maupun yang regional seperti MEA mendorong daerah mempersiapkan diri untuk bersaing dan berkompetisi. Deregulasi terhadap arus masuk produk hingga tenaga kerja asing akan menjadikan persaingan pasar tidak hanya terjadi di dalam pasar internasional, tetapi sudah berlangsung pada proses produksi di dalam negeri.

3. Ketersediaan Bahan Baku Industri

Dalam konsepsi kedaulatan industri daerah, bahan baku industri seyogyanya tersedia dalam jumlah cukup di daerah. Ketersediaan ini diperlukan untuk menjamin kelangsungan produksi. Ketersediaan yang dimaksud dapat berupa peningkatan upaya produksi maupun ketersediaan pasokan bahan baku.

4. Peningkatan Investasi

Iklim investasi yang kondusif masih perlu didorong untuk tumbuh dan diwujudkan di daerah. Kewenangan, kelembagaan, hingga prosedur investasi yang efisien akan mendorong investor menanamkan modal di daerah.

5. Laju Konversi Lahan Pertanian

Kebutuhan pemanfaatan ruang budidaya seiring laju perkembangan manusia harus diikuti dengan konversi lahan, karena lahan yang tersedia bersifat tetap sementara perubahan bersifat dinamis. Sebagai kota yang sedang tumbuh, Slawi dan kota-kota kecamatan lainnya membutuhkan ruang budidaya yang memadai untuk kelengkapan sarana perkotaan seperti permukiman, pendidikan, hingga perdagangan. Lahan-lahan yang dialokasikan dalam pola ruang yang ada diakui menyebabkan konversi lahan pertanian.

6. Kesiapan sebagai Destinasi Internasional

Kabupaten Tegal terus menyiapkan diri sebagai kawasan destinasi nasional maupun internasional. Tren kunjungan wisatawan yang meningkat perlu diiringi dengan kesiapan sarana, prasarana hingga infrastruktur sosial sehingga wisatawan yang singgah dapat merasakan Kabupaten Tegal sebagai daerah yang *mbetahi* dan *ngangen*i.

7. Kualitas Sumber Daya Manusia

Secara kuantitas, penduduk Kabupaten Tegal unggul dalam hal jumlah. Sehingga sebagaimana yang dipaparkan dalam bab sebelumnya, Kabupaten Tegal punya potensi sumberdaya manusia yang melimpah. Besarnya jumlah merupakan pasar yang cukup potensial bagi pengembangan ekonomi. Tetapi dari sisi kualitas, kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Tegal belum cukup menggemblirakan. Kondisi ini bisa dilihat dari pendidikan terakhir yang ditamatkan atau ijazah terakhir yang dimiliki oleh penduduk di Kabupaten Tegal. Dari pendidikan yang tertinggi yang ditamatkan, pada tahun 2021 penduduk Kabupaten Tegal masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 53,18% penduduk dengan usia 15 tahun ke atas.

Tantangan yang ada tidak berdiri tunggal. Di sebelahny terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan agar tantangan dapat dieliminasi sekaligus agar potensi dapat dikembangkan. Beberapa **peluang** pembangunan ekonomi di Kabupaten Tegal antara lain sebagai berikut:

1. Migrasi Investasi dari Ibukota

Tingginya faktor produksi bagi investasi di wilayah Jabodetabek mendorong investor mengalihkan usahanya ke wilayah Jawa Tengah. Kabupaten Tegal sebagai “pintu gerbang” Jawa Tengah wilayah barat menawarkan insentif strategis bagi investor. Kabupaten Tegal tidak terlampaui jauh dengan ibukota, sehingga arus lalu lintas produksi dari pabrik asal tidak terlampaui jauh. Upah Minimum Kabupaten (UMK) masih kompetitif, mengingat tingkat inflasi dan kemahalan harga yang terkendali. Dari aspek tata ruang, telah dialokasikan pola ruang kawasan industri di Kecamatan Margasari dan pantura dalam Rancangan RTRW.

2. Jalur Tol yang Melintasi Wilayah Kabupaten

Keberadaan jalan tol yang melintasi wilayah kabupaten akan membuka aksesibilitas yang lebih terbuka bagi masyarakat dan pelaku usaha. Lalu lintas perdagangan, industri, hasil usaha pertanian hingga UMKM semakin terbuka. Dengan sendirinya jalan tol akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

3. Tumbuhnya Destinasi Baru Berbasis Masyarakat

Industri pariwisata dalam dekade terakhir sedang tumbuh dan bergairah. Menariknya, industri pariwisata yang sedang berkembang saat ini berbasis masyarakat dalam konsep wisata desa. Destinasi-destinasi baru yang tumbuh menjadi alternatif bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tegal.

4. Luasnya Pasar Domestik

“Ekspor” Kabupaten Tegal di wilayah regional dan nasional merupakan salah satu pilar perekonomian masyarakat. Produk-produk unggulan Kabupaten Tegal di bidang komponen otomotif, komponen kapal hingga komponen mesin telah dikenal luas oleh publik. Sebagai keunggulan kompetitif, produk unggulan komponen kapal telah memiliki sertifikasi internasional Badan Klasifikasi Indonesia (BKI), dengan kualitas setara Standar Nasional Indonesia (SNI).

5. Keberadaan Sarana Unggulan

Sarana yang dimiliki Kabupaten Tegal memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang cukup baik di tingkat regional maupun nasional. Laboratorium Material Non Ferro di Lingkungan Industri Kecil (LIK) Takaru Tegal merupakan salah satu lab terbaik nasional di bidang material non ferro. Keberadaan Taman Teknologi Pertanian (TTP) dapat menjadi wahana litbang pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

6. Iklim Investasi yang Sehat

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan lembaga yang mengintegrasikan upaya mendorong investasi dan mengeluarkan pelbagai izin usaha. Kelembagaan yang terintegrasi ini mendorong terbangunnya iklim investasi yang sehat, yaitu mudah, murah, dan efisien.

Memperhatikan kondisi eksisting yang ada upaya mendorong pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tegal tahun 2023 sesuai dengan target sebesar 4,2 – 5,35% dapat tercapai dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah Kabupaten Tegal yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
2. Stabilitasnya tingkat perkembangan industri pengolahan di Kabupaten Tegal baik industri yang berskala kecil (UMKM) maupun industri yang banyak menyerap tenaga kerja.
3. Tingkat investasi semakin meningkat seiring dengan banyaknya perusahaan yang berpindah ke Daerah dari kawasan Jabodetabek.

4. Lokasi industri yang ada di wilayah pantura dan Kecamatan Margasari semakin berkembang.
5. Dibukanya jalan tol menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi karena dapat memudahkan akses bahan baku.
6. Kondisi perekonomian/lingkungan investasi regional Jawa Tengah stabil dan daya saing lokal yang semakin menguat di wilayah regional.
7. Perda revisi RTRW Kabupaten Tegal selesai tahun 2022 sehingga dapat menjadi acuan lokasi investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
8. Pertumbuhan belanja modal yang dialokasikan melalui APBD dan APBDes.
9. Kecepatan layanan dalam berinvestasi.

Sementara **arah kebijakan** untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Prioritas pada Sektor Kontribusi Terbesar dalam PDRB (Pertanian, Industri, Perdagangan)

Program dan kegiatan pembangunan setelah urusan wajib pelayanan dasar diprioritaskan pada urusan pertanian, perindustrian dan perdagangan. Prioritas pada urusan-urusan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, industri dan perdagangan, yang pada akhirnya akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

PDRB Kabupaten Tegal bertumpu pada konsumsi masyarakat. Untuk menjamin keberlanjutan konsumsi masyarakat, program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk upaya peningkatan pendapatan masyarakat.

3. Menurunkan Kemiskinan

Meskipun capaian kinerja kemiskinan Kabupaten Tegal relatif baik di rata-rata Jawa Tengah dan nasional, upaya penurunan kemiskinan melalui upaya mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat merupakan fondasi pembangunan di Kabupaten Tegal.

4. Melakukan Revisi Tata Ruang

RTRW yang sedang direvisi perlu menjamin pola ruang yang cukup bagi investasi. Legalitas pola ruang investasi di wilayah pantura dan Kecamatan Margasari, serta penambahan beberapa Kawasan Peruntukan Industri ditandai dengan upaya revisi RTRW.

5. Mewujudkan Iklim Investasi yang Sehat

Iklim investasi yang ramah, mudah, mudah dan efisien perlu terus menjadi perhatian. Tidak hanya DPMPTSP sebagai garda depan investasi, tetapi juga semua pihak perlu mewujudkan investasi yang sehat di Kabupaten Tegal. Deregulasi dan sistem insentif menjadi prioritas pembangunan ekonomi Kabupaten Tegal.

6. Menumbuhkan Kewirausahaan Pemuda

Upaya mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan berbasis masyarakat akan diprioritaskan pada kelompok umur pemuda. Pemuda dengan harapan hidup yang masih panjang akan menjadi pilar sumber daya pembangunan daerah. Kewirausahaan pemuda akan didesain berbasis inkubator bisnis yang mendidik pemuda menjadi wirausaha. Pemuda-pemuda yang telah dilatih juga terbuka kemungkinan untuk memiliki keahlian dan keterampilan sebagai tenaga kerja terdidik.

- 7. Menjamin Ketersediaan Produksi dan Pasokan Karbohidrat dan Protein**
Konsumsi karbohidrat dan protein yang cukup akan menjamin kualitas kesehatan masyarakat. Program dan kegiatan pembangunan akan diarahkan untuk menjamin ketersediaan produksi dan pasokan karbohidrat untuk kecukupan gizi seimbang masyarakat.
- 8. Meningkatkan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Lokal (Wisata, Pertanian, Perdagangan)**
Infrastruktur pendukung ekonomi lokal akan terus ditingkatkan kualitasnya. Sehingga produk pariwisata, usaha tani, dan perdagangan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan murah.
- 9. Meningkatkan Promosi Potensi Daerah**
Promosi potensi daerah menjadi prioritas pembangunan untuk memberi akses informasi, komunikasi dan pada akhirnya investasi yang mudah, murah dan profesional bagi calon investor.
- 10. Pengendalian Inflasi**
Pengendalian inflasi akan diintervensi melalui dua strategi utama, yaitu menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan dasar masyarakat serta menjamin ketersediaan infrastruktur. Ketersediaan pasokan akan mengendalikan harga sementara ketersediaan infrastruktur akan menekan distribusi berbiaya tinggi.
- 11. Meningkatkan Investasi Pemerintah**
Investasi pemerintah akan diwujudkan dalam peningkatan belanja modal pemerintah. Belanja modal pemerintah di samping menekan biaya produksi dan distribusi masyarakat, sekaligus menjadi investasi pembangunan untuk meningkatkan serapan tenaga kerja dalam pembangunan proyek strategis daerah.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Tegal mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2023 ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut.

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2023 pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Kebijakan umum pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalan serta peningkatan pendapatan dalam tahun 2023 berdasarkan kondisi yang telah berjalan dalam periode lima tahun sebelumnya. Kebijakan umum pendapatan daerah disesuaikan dengan struktur dan sumber-sumber penerimaannya. Adapun kebijakan umum dari pendapatan daerah tersebut adalah:

1. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal
 - a. Meningkatkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan perbaikan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
 - c. Melakukan sosialisasi kesadaran pembayaran pajak dan pelaksanaan *door to door* bekerjasama dengan Pihak Ketiga;
 - d. Penerapan e-tiketing objek wisata dan pasar.
 - e. Kerjasama pihak lain dalam intensifikasi potensi pendapatan (data layanan pelanggan).
 - f. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM, BPR-BKK, dan Bank Jateng berupa perolehan laba maupun penyertaan modal.
 - g. Mengalokasikan tambahan penerimaan daerah berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan mengoptimalkan manajemen kas daerah dan pengelolaan aset-aset daerah yang berpotensi memberikan sumber-sumber penerimaan bagi pendapatan asli daerah.
 - h. Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
 - i. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;
 - j. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
 - k. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;
 - l. Pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.
2. Kebijakan Umum Sumber Pendapatan Transfer (Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah)
 - a. Pemenuhan *readiness criteria*, peningkatan kualitas Proposal Kegiatan, KAK (Kerangka Acuan Kerja), dan TOR (*Terms of Reference*) dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Bantuan Provinsi sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah. Selain itu, hal-hal tersebut juga perlu dilaksanakan untuk mencari peluang Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan lokus Kegiatan di Kabupaten Tegal.
 - b. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah.

- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dana transfer, khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana transfer.
- d. Peningkatan kualitas prasyarat DID yang dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utama digunakan untuk menentukan kelayakan suatu daerah menerima DID dengan indikator: opini BPK WTP atas LKPD, penetapan Perda APBD tepat waktu dan melaksanakan *e-government*. Sementara kriteria kinerja digunakan menilai kinerja daerah berdasarkan variabel kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, kinerja pelayanan dasar publik bidang pendidikan, pelayanan dasar publik bidang kesehatan, pelayanan dasar publik bidang infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum pemerintahan, peningkatan ekspor, peningkatan investasi, pengelolaan sampah, pengendalian inflasi daerah dan indeks pencegahan korupsi. Selain itu, DID dapat diberikan dalam rangka mendapatkan penilaian penghargaan dari kementerian/teknis.
- e. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi sebagai upaya penjaminan ketersediaan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan dana bantuan keuangan dari provinsi.

Pendapatan daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp2.710.756.989.000,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp537.994.815.000,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.166.762.174.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp6.000.000.000,00. Target Pendapatan Asli Daerah terutama dari sektor pajak diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp60.743.000.000,00 dari pendapatan pajak tahun 2022 sedangkan pendapatan lain-lain yang sah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp14.699.999.500,00 dari pendapatan lain-lain yang sah tahun 2022.

Alokasi pendapatan transfer pemerintah pusat pada tahun 2023 menyesuaikan dengan pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2022 yang mendasari rincian alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 dimana alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp33.543.937.000,00, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.077.039.778.000,00 sedangkan alokasi DAK terpasang sebesar Rp481.307.348.000,00 berbeda dari rincian TKDD tahun 2022 yaitu sebesar Rp565.290.796.000,00. Perbedaan alokasi DAK bersumber dari alokasi DAK Fisik, dimana alokasi DAK Fisik tidak mendasari alokasi untuk masing-masing bidang penerima DAK Fisik tahun 2022. Hal tersebut dengan mempertimbangkan untuk anggaran DAK Fisik tetap melalui mekanisme perangkat daerah menginput usulan melalui aplikasi KRISNA. sedangkan, proyeksi pendapatan DAK Non Fisik diproyeksikan sama dengan DAK Non Fisik tahun 2022 dengan pertimbangan alokasi tersebut rutin diterima oleh Pemerintah Daerah. Untuk alokasi dana desa tahun 2023 direncanakan Rp359.781.317.000 sama dengan alokasi dana desa tahun 2022.

Selanjutnya pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan dari provinsi terdapat pengecualian. Proyeksi pendapatan bantuan keuangan dari provinsi tidak tercantum dalam proyeksi pendapatan tahun 2023 dikarenakan belum jelasnya program dan alokasi dari Pemerintah Provinsi dan untuk bagi hasil dari provinsi di proyeksi Rp215.089.794.000,00 atau bertambah sebesar Rp22.037.600.000,00 dari tahun 2022. Sedangkan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2023 diproyeksikan sama dengan alokasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp6.000.000.000,00.

Adapun kinerja keuangan dari sektor pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Tegal dalam kurun waktu tiga tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dan APBD tahun 2022 sebagai dampak pandemi covid-19 serta proyeksi pendapatan daerah tahun 2023 dan tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten
Tegal Tahun 2019 - 2024**

No	Uraian	Tahun					
		R 2019	R 2020	R 2021*)	2022	Proyeksi/Target 2023	Proyeksi/Target 2024**)
1	PENDAPATAN	2.755.677.484.152	2.651.771.838.698	2.639.569.653.388	2.690.855.033.000	2.710.756.989.000	2.761.290.092.000
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	436.003.392.413	439.931.567.175	431.416.461.549	458.043.751.000	537.994.815.000	443.052.070.000
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	122.808.450.157	125.236.006.697	142.186.246.723	133.365.000.000	194.108.000.000	137.333.600.000
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	25.207.739.921	19.290.694.924	20.521.515.998	26.826.948.500	28.072.999.000	28.241.405.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.395.196.773	14.185.195.523	15.417.023.399	14.198.601.000	17.460.615.000	13.758.000.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	265.592.005.562	281.219.670.031	253.291.675.429	283.653.201.500	298.353.201.000	263.719.065.000
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.178.562.532.180	2.056.187.505.939	2.098.747.519.893	2.226.811.282.000	2.166.762.174.000	2.312.238.022.000
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.927.627.217.336	1.900.438.144.445	1.911.524.058.042	2.033.759.088.000	1.951.672.380.000	2.131.035.828.000
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	22.161.572.062	36.287.432.768	42.890.214.753	31.647.197.000	33.543.937.000	30.713.190.000
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.198.561.641.000	1.086.704.382.000	1.077.039.778.000	1.077.039.778.000	1.077.039.778.000	1.112.675.840.000
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	365.945.635.277	354.722.997.677	413.496.369.889	565.290.796.000	481.307.358.000	609.450.214.000
1.2.1.4	Dana Insentif Daerah	44.577.009.000	64.411.379.000	18.742.708.000	0	0	18.742.708.000
1.2.1.5	Dana Desa	340.958.368.997	358.311.953.000	359.354.987.400	359.781.317.000	359.781.317.000	359.453.876.000
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	206.358.305.844	155.749.361.494	187.223.461.851	193.052.194.000	212.829.725.000	181.202.194.000
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	173.568.253.580	151.186.151.494	186.620.461.851	193.052.194.000	212.829.725.000	181.202.194.000
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	32.790.052.264	4.563.209.000	603.000.000		0	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	141.111.559.559	155.652.766.584	109.405.671.946	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	141.111.559.559	155.652.766.584	5.539.153.846	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
1.3.2	Dana Darurat	0	0		0	0	0
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan	0	0	103.866.518.100	0	0	0

Sumber : Bappedalitbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2022

Keterangan :

*) Realisasi APBD Tahun 2021 *anaudited*

**) Proyeksi PAD berdasarkan pada Perubahan RPJMD Tajun 2019-2024

Proporsi pendapatan daerah masih didominasi dari pendapatan transfer baik transfer pemerintah pusat maupun transfer antardaerah. Proporsi pendapatan transfer dari tahun 2019 sampai dengan proyeksi tahun 2024 masih diatas 70%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan pemerintah daerah masih sangat bergantung dari transfer pemerintah pusat.

**Tabel 3.7 Proporsi Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Tahun 2019 – 2024**

No	Uraian	R.2019	R.2020	R.2021*)	2022	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
1	Pendapatan Asli Daerah	15,82	16,59	16,34	17,02	18,54	16,05
2	Pendapatan Transfer	79,06	77,54	79,51	82,75	81,23	83,74
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5,12	5,87	4,15	0,33	0,23	0,21

Sumber : Bappedalitbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2022

Keterangan :

*) Realisasi APBD Tahun 2021 unaudited

Pandemi covid-19 yang masih berlangsung mempengaruhi pendapatan daerah yang cenderung mengalami penurunan, terutama pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat. Sedangkan pada pendapatan asli daerah, dari sektor pajak diasumsikan mengalami kenaikan. Akan tetapi, jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2019 - 2021 yang mengalami kenaikan sebesar 0,73%. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,04%

Sedangkan dari pendapatan transfer mengalami kenaikan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,07%. Pendapatan transfer pemerintah pusat naik sebesar 3,45%, dimana pendapatan DAK mengalami kenaikan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,48% disebabkan oleh pendapatan BOS yang semula masuk dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah, dengan adanya TKDD yang baru masuk dalam pendapatan DAK. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 99,38%.

**Tabel 3.8 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2020-2022**

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021*) (Rp)	Tahun 2022 **) (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	2.651.771.838.698	2.639.569.653.388	2.690.855.033.000	0,73
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	439.931.567.175	431.416.461.549	458.043.751.000	2.04
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	125.236.006.697	142.186.246.723	133.365.000.000	3.19
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	19.290.694.924	20.521.515.998	26.826.948.500	17.93
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.185.195.523	15.417.023.399	14.198.601.000	0.05
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	281.219.670.031	253.291.675.429	283.653.201.500	0.43
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.056.187.505.939	2.098.747.519.893	2.226.811.282.000	4.07
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.900.438.144.445	1.911.524.058.042	2.033.759.088.000	3.45
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	36.287.432.768	42.890.214.753	31.647.197.000	(6.61)
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.086.704.382.000	1.077.039.778.000	1.077.039.778.000	(0.45)
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	354.722.997.677	413.496.369.889	481.307.358.000	16.48
1.2.1.4	Dana Insentif Daerah	64.411.379.000	18.742.708.000	0	(100)
1.2.1.5	Dana Desa	358.311.953.000	359.354.987.400	359.781.317.000	0.20
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	155.749.361.494	187.223.461.851	193.052.194.000	11.33
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	151.186.151.494	186.620.461.851	193.052.194.000	13.00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	4.563.209.000	603.000.000		(100)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	155.652.766.584	109.405.671.946	6.000.000.000	(99.38)
1.3.1	Pendapatan Hibah	155.652.766.584	5.539.153.846	6.000.000.000	(99.38)
1.3.2	Dana Darurat	0		0	0
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan	0	103.866.518.100	0	(100)

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021*) (Rp)	Tahun 2022 **) (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)

Sumber : Bappedalitbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2022

Keterangan :

*) Realisasi APBD Tahun 2021 *anaudited*

**) Penetapan APBD Tahun 2022

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Struktur belanja daerah tahun 2023 disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Struktur belanja daerah tahun 2023 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa dialokasikan untuk pemenuhan belanja rutin perangkat daerah dan mendorong kinerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi untuk setiap perangkat daerah melalui pemberian honorarium ataupun jasa kepada PNS atau Non PNS, pembiayaan iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan; Pembiayaan program-program pendukung perekonomian dan komponen belanja barang dan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Belanja barang jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, dan akutabilitas. Termasuk didalamnya alokasi untuk penanganan dan pemulihan paska pandemi covid-19.
 - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja hibah tahun 2022 digunakan untuk mendukung program prioritas daerah. Belanja hibah antara lain digunakan untuk pembiayaan stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, instansi vertikal, PKK, Pramuka, organisasi olahraga, sarana peribadatan/keagamaan, kesenian / kebudayaan, serta hibah kepada partai politik;
 - d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan Sosial Tahun 2023 diantaranya untuk menangani masalah sosial dan kemiskinan.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum

dan Perumahan dan Permukiman.

3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan social yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Sedangkan yang termasuk dalam keadaan yang mendesak meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan umum Belanja Daerah dalam Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tegal tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian target, sasaran dan program unggulan RPJMD 2019-2024;
2. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
3. Belanja daerah dialokasikan untuk dapat mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan berupa urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Tegal.
4. Alokasi Belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat Kabupaten Tegal di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan sosial dan pemerintahan umum untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi.

5. Alokasi Belanja Daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pilihan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi daerah sesuai dengan karakteristik kewilayahan di Kabupaten Tegal.
6. Alokasi belanja daerah adalah untuk pemenuhan kepentingan publik dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
7. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka menguatkan program-program yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kewilayahan;
8. Dukungan implementasi kebijakan penanganan Kemiskinan Ekstrem di wilayah kabupaten;
9. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan dan 10 persen fungsi kesehatan; sedangkan *mandatory* untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran;
10. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam implementasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang, khususnya untuk Pembangunan Pasar Tradisional di Kabupaten Tegal;
11. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
12. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2023 melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa; serta
13. Persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2023 dan Persiapan Pengamanan Tertutup Pilpres dan Pileg Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 akan mengakomodir belanja pada tahun sebelumnya yang tidak dilaksanakan akibat adanya *refocusing* anggaran sebagai dampak pandemi covid-19. Adapun kebijakan belanja daerah tersebut diantaranya adalah:

1. Pagu anggaran perangkat daerah mendasari pagu tahun 2022 yang telah ditetapkan dikurangi 10% dari pagu tahun 2022 dan pagu pengadaan yang telah selesai dilaksanakan;
2. Kegiatan rutin usulan perangkat daerah untuk tahun 2023;
3. Kegiatan Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Kegiatan dari hasil penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
5. Kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat melalui proses Musrenbang dan usulan masyarakat lainnya;

Belanja daerah Kabupaten Tegal pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp2.886.280.610.500,00 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp2.088.994.167.305,00, belanja modal sebesar Rp238.269.626.195,00, belanja tidak terduga sebesar Rp10.000.000.000,00, serta belanja transfer sebesar Rp549.016.817.000,00. Kinerja keuangan dari belanja daerah Pemerintah Kabupaten Tegal dalam kurun waktu tiga tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dan APBD tahun 2022 sebagai dampak pandemi *covid-19* serta proyeksi belanja daerah tahun 2023 dan tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2019 – 2024**

No	Uraian	Tahun					
		R. 2019	R. 2020	R. 2021*)	2022**)	Proyeksi/Target 2023	Proyeksi/Target 2024
2	BELANJA	2.717.431.598.854	2.010.868.784.570	2.555.312.905.223	2.869.008.063.000	2.886.280.610.500	2.904.712.700.000
2.1	BELANJA OPERASI	1.776.068.220.040	1.683.573.672.389	1.722.667.545.035	1.981.320.229.159	2.088.994.167.305	1.975.860.970.000
2.1.1	Belanja Pegawai	1.133.760.553.898	1.068.550.795.583	1.039.718.272.993	1.177.124.164.867	1.245.940.800.557	1.214.730.222.000
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	578.593.810.142	571.116.366.806	613.289.593.822	722.650.073.772	771.511.617.228	574.125.148.000
2.1.3	Belanja Hibah	39.818.765.000	38.230.180.000	66.631.178.220	78.268.990.520	69.509.749.520	183.227.600.000
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	23.895.091.000	5.676.330.000	3.028.500.000	3.277.000.000	2.032.000.000	3.778.000.000
2.2	BELANJA MODAL	434.393.482.658	248.977.818.850	330.827.804.153	351.347.703.841	238.269.626.195	413.628.570.000
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000	78.317.293.331	10.404.333.775	13.898.313.000	10.000.000.000	10.000.000.000
2.4	BELANJA TRANSFER	506.968.396.156	494.671.164.849	491.413.222.260	522.441.817.000	549.016.817.000	505.223.160.000
2.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	8.243.113.740	10.151.562.329	11.826.401.862	15.000.000.000	15.000.000.000	16.557.500.000
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	498.725.282.416	484.519.602.520	479.586.820.398	507.441.817.000	534.016.817.000	488.665.660.000

Sumber: Bappedalitbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2022

*) Realisasi APBD Tahun 2021 anaudited

**) APBD Tahun 2022

**Tabel 3.10 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Tegal
Tahun 2019-2021**

No	Uraian	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2	Belanja				
2.1	Belanja Operasi	65,36	67,2	67,41	3,18
2.2	Belanja Modal	15,99	9,93	12,95	(10,01)
2.3	Belanja Tidak Terduga	0	3,13	0,41	-
2.4	Belanja Transfer	18,65	19,74	19,73	2,85

Sumber: Bappedalitbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2022

Dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, tercantum proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan mendasari kondisi riil akibat dampak pandemi covid-19. Adapun untuk proyeksi belanja dan pembiayaan sangat dipengaruhi dengan kebijakan keuangan daerah dan kebijakan pemerintah pusat sebagai upaya pemulihan ekonomi dan kesehatan akibat pandemi covid-19.

Secara umum, belanja daerah tahun 2023 pada dokumen Perubahan RPJMD sebesar Rp2.807.046.290.000,00 lebih besar Rp63.506.247.000,00 dibandingkan dengan belanja daerah tahun 2023 pada RKPD Tahun 2023 sebesar Rp2.743.540.043.000,00 Selisih tersebut paling besar berasal dari belanja pegawai dan belanja modal.

Pembiayaan daerah dalam rancangan akhir RKPD tahun 2023 diproyeksi Rp218.023.621.500,00. Dimana sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya di proyeksi lebih tinggi. Pemberian pinjaman daerah sebagai salah satu kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi paska pandemi covid-19.

**Tabel 3.11 Perhitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2023**

No	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun Rencana	Proyeksi RKPD Tahun Rencana	Selisih
A	Belanja	2.807.046.290.000	2.886.280.610.500	79.234.320.500
	BELANJA OPERASI	1.857.233.606.000	2.088.994.167.305	231.760.561.305
	Belanja Pegawai	1.194.730.222.000	1.245.940.800.557	51.210.578.557
	Belanja Barang dan Jasa	595.497.784.000	771.511.617.228	176.013.833.228
	Belanja Hibah	63.227.600.000	69.509.749.520	6.282.149.520
	Belanja Bantuan Sosial	3.778.000.000	2.032.000.000	(1.746.000.000)
	BELANJA MODAL	434.949.154.000	238.269.626.195	(196.679.527.805)
	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	10.000.000.000	-
	BELANJA TRANSFER	504.863.530.000	549.016.817.000	44.153.287.000
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	16.197.870.000	15.000.000.000	(1.197.870.000)
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kab. /Kota dan Pemerintah Desa	488.665.660.000	534.016.817.000	45.351.157.000
B	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000.000	42.500.000.000	2.500.000.000
	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000	30.000.000.000	0
	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000	11.500.000.000	1.500.000.000
	Pemberian Pinjaman Daerah	0	1.000.000.000	1.000.000.000

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah pemanfaatan sumber-sumber dana yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi daerah atau menimbulkan kewajiban ekonomis bagi daerah. Pembiayaan daerah dialokasikan untuk dapat menutup defisit anggaran akibat lebih besarnya alokasi belanja daerah dibanding dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah atau pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Disisi lain apabila terdapat surplus maka pembiayaan daerah juga dapat dialokasikan untuk penyertaan modal dari pemerintah daerah pada BUMD maupun lembaga usaha lain yang dapat memberi nilai tambah ekonomis bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku atau pembentukan dana cadangan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah untuk keperluan tertentu seperti Pemilihan Kepala Daerah.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan penerimaan lain yang bukan merupakan pendapatan daerah. Kebijakan umum untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2023 adalah Penggunaan SiLPA sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan- kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2023 adalah:

1. Penyertaan modal Bank Jateng, PDAM dan BPR Tegal Gotong Royong sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada PT BPD Jawa Tengah dan BUMD
2. Pemberian Pinjaman Daerah kepada BPR Tegal Gotong Royong sebagai wujud pemulihan ekonomi dalam masa pandemi covid-19 untuk Program Kredit Usaha kepada masyarakat.
3. Pembentukan Dana Cadangan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kinerja keuangan dari sektor pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Tegal dalam kurun waktu tiga tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dan APBD tahun 2022 sebagai dampak pandemi covid-19 serta proyeksi pembiayaan tahun 2023 dan tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.12 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2019 - 2024**

No	Uraian	Tahun					
		R. 2019	R. 2020	R. 2021	2022	Proyeksi/Target 2023	Proyeksi/Target 2024
3	PEMBIAYAAN DAERAH	50.685.997.599	71.864.208.527	211.125.742.486	178.153.030.000	175.523.621.500	133.422.608.000
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	60.034.997.599	88.993.266.248	218.125.742.486	215.653.030.000	218.023.621.500	143.422.608.000
3.1.1	Penggunaan SILPA	59.879.097.966	0	218.096.097.806	215.653.030.000	218.023.621.500	90.922.608.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	60.000.000.000
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	155.899.633	109.842.755	29.644.680	0	0	2.500.000.000
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.349.000.000	17.238.900.476	7.000.000.000	37.500.000.000	42.500.000.000	10.000.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0		30.000.000.000	30.000.000.000	0
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	9.349.000.000	15.849.000.000	4.500.000.000	6.000.000.000	11.500.000.000	10.000.000.000
3.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	1.500.000.000	1.000.000.000	0
3.2.4	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	1.389.900.476	0	0	0	0
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0	0	2.500.000.000	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	50.685.997.599	71.864.208.527	211.125.742.486	178.153.030.000	175.523.621.500	133.422.608.000

Sumber : Bappedalitbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2022

*) APBD Tahun 2022

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya

Tabel 3.13 Proyeksi Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas

No	Uraian	Target	Proyeksi
		2022	2023
1	Belanja Operasi	1.258.670.155.387	1.317.482.550.077
1.1	Belanja Pegawai	1.177.124.164.867	1.245.940.800.557
1.2	Belanja Bunga		
1.3	Belanja Subsidi		
1.4	Belanja Hibah	78.268.990.520	69.509.749.520
1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.277.000.000	2.032.000.000
2	Belanja Transfer	522.441.817.000	549.016.817.000
2.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	15.000.000.000	15.000.000.000
2.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	507.441.817.000	534.016.817.000
3	Belanja Tak Terduga	13.898.313.000	10.000.000.000
2.3.1	Belanja Tak Terduga	13.898.313.000	10.000.000.000
4	Pengeluaran Pembiayaan	37.500.000.000	42.500.000.000
4.1.	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo		
4.2	penyertaan modal daerah;	6.000.000.000	11.500.000.000
4.3.	pembentukan Dana Cadangan;	30.000.000.000	30.000.000.000
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	1.500.000.000	1.000.000.000
4.5.	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan		
	Total Belanja Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	1.832.510.285.387	1.918.999.367.077

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

Selanjutnya berdasarkan dari proyeksi penerimaan daerah dan perhitungan pengeluaran periodik wajib dan mengikat maka dapat ditentukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.14 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2023

No.	Uraian	Target	Proyeksi
		2022	2023
1.	Pendapatan	2.690.855.033.000	2.710.756.989.000
2.	Penerimaan Pembiayaan	215.653.030.000	218.023.621.500
	TOTAL PENERIMAAN	2.906.508.063.000	2.928.780.610.500
	(Dikurangi):		
3.	Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	1.832.510.285.387	1.918.999.367.077
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.073.997.777.613	1.009.781.243.423

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

Perlu dipahami bahwa dengan adanya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai secara berbeda. Sebelumnya, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 tahun 2019, Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 yang terakhir kali dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 sebagian besar belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah dimasukkan ke dalam komponen belanja program/kegiatan/subkegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan berbeda dan agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas riil pagu belanja program/keg/subkeg OPD sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.15 Kapasitas Riil Pagu OPD Tahun 2023

NO	URAIAN	Proyeksi Tahun 2023
1	PENERIMAAN DAERAH	2.928.780.610.500
1.1	PENDAPATAN DAERAH	2.710.756.989.000
1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	537.994.815.000
1.1.2	Pendapatan Transfer	2.166.762.174.000
1.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.000.000.000
1.2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	218.023.621.500
1.2.1	SiLPA	218.023.621.500
1.2.2	Pencairan Dana Cadangan	0
1.2.3	Penerimaan Piutang Daerah	0
2	BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	601.516.817.000
2.1	Belanja Transfer	549.016.817.000
2.2	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
2.3	Pengeluaran Pembiayaan	42.500.000.000
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH (1-2)	2.327.263.793.500

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

Berdasarkan perhitungan Kapasitas Riil Keuangan Daerah tahun 2023 sebesar Rp2.327.263.793.500 selanjutnya akan dialokasikan untuk membiayai Belanja Perangkat Daerah dalam RKPD tahun 2023.

Tabel 3.16 Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2023
1	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I	1.616.320.140.557
1.1	Belanja Langsung Wajib dan Mengikat serta Pemenuhan Penerapan Pelayanan Dasar	1.616.320.140.557
2	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II	537.268.763.000
2.1	Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah	537.268.763.000
3	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas III	173.674.889.943
3.1	Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya	173.674.889.943
	Kapasitas Riil Keuangan Daerah (1+2+3)	2.327.263.793.500

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022